



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 42 /KEP/HK/2024

TENTANG

POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan bencana non alam kejadian luar biasa rabies yang telah mengakibatkan 34 korban jiwa meninggal akibat gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Sikka, Ende dan Manggarai, perlu dilakukan upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar/prosedur penanganan yang diselenggarakan berdasarkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- b. bahwa mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana perlu dibentuk Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 389/KEP/HK/2023 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengoordinasikan, mengendalikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan serta memantau dan mengevaluasi tindakan seluruh *stakeholder* dalam masa darurat bencana.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Tugas dari Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan berakhir setelah status keadaan darurat penanganan bencana non alam kejadian luar biasa rabies sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **22 JANUARY** 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
15. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
16. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| KEPALA BIRO HUKUM |  |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 42/KEP/HK/2024****TANGGAL : 22 JANUARI 2024****TENTANG POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|------------|--|----------------------------|---|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur. | Pengarah | Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Posko. |
| 2. | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. | Pengarah | |
| 3. | Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang. | Pengarah | |
| 4. | Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang. | Pengarah | |
| 5. | Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang. | Pengarah | |
| 6. | Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur. | Pengarah | |
| 7. | Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur; | Pengarah | |
| 8. | Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Pengawas | Memberi bantuan pengawasan dan konsultasi serta pendampingan dalam rangka pengelolaan anggaran sesuai prosedur yang berlaku. |
| 9. | Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Pengawas | |
| 10. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Komandan Posko | <ol style="list-style-type: none"> Memimpin pelaksanaan kegiatan posko; dan melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas posko dalam meningkatkan kewaspadaan, tindakan pencegahan dan pengendalian rabies. |
| 11. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> Membantu Komandan Posko dalam memimpin pelaksanaan kegiatan posko; dan melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lingkup Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas posko. |

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|---|--|---------------------|--|
| A. POKJA SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT DAN VAKSINASI HEWAN RENTAN | | | |
| 12. | Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat; |
| 13. | Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan surveillance berbasis resiko pada daerah-daerah terancam penyebaran penyakit rabies untuk mendeteksi keberadaan virus rabies; |
| 14. | Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang | | <ul style="list-style-type: none"> c. Menggerakan sumber daya manusia di lapangan untuk melaporkan kejadian penyakit yang mengarah ke Penyakit Rabies melalui iSIKNAS secara cepat; |
| 15. | Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang | | <ul style="list-style-type: none"> d. Meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan system Kesehatan hewan nasional melalui penerapan Otoritas Veteriner; |
| 16. | Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> e. Menyediakan vaksin dan logistik penanganan rabies di NTT; |
| 17. | Koordinator Program AIHSP Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat; dan |
| 18. | Pimpinan FAO Ectad Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <ul style="list-style-type: none"> g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 19. | Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc / Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | | |
| 20. | Drh. Nita Maria Ninef / Medik Veteriner Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | | |
| 21. | Feny Apriani L. Bili, S.KH / Paramedik Veteriner Penyelia pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | | |
| 22. | Frederika A. Allung, S.Pt / Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 23. | Emanuel Gerubu, A.Md.Vet / Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 24. | Rocky Taosu, A.Md / Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 25. | Drh. Piter Gerson Nitbani / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 26. | Drh. Arthenia D. Manafe / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 27. | Drh. Christin Yunita Linda Mere / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 28. | Johannes Marianus, ST / Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|---|---|---------------------|--------------|
| B. POKJA SURVEILANS TERPADU DAN VAKSINASI KELOMPOK RENTAN | | | |
| 29. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Koordinator | |
| 30. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 31. | Kasiter Korem 161/Wira Sakti Kupang | Anggota | |
| 32. | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; | Anggota | |
| 33. | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 34. | Pimpinan WHO Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 35. | Pimpinan FAO Ectad Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 36. | Yosefita Juwita, SKM /Analis Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 37. | Kasie. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 38. | Maratina Diska Widayani, SKM/Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 39. | Syafrudin Herman, SE, MM / Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| C. POKJA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) | | | |
| 40. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | Koordinator | |
| 41. | Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 42. | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 43. | Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kelas 1 Kupang | Anggota | |
| 44. | Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 45. | Pimpinan WHO Indonesia Provinsi NTT | Anggota | |
| 46. | Pimpinan FAO Ectad Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 47. | Koordinator Program AIHSP Provinsi NTT | Anggota | |
| 48. | Koordinator Program SIAP SIAGA Provinsi NTT | Anggota | |
| <p>a. Melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat;</p> <p>b. Meningkatkan penanganan dini terhadap pasien yang digigit anjing;</p> <p>c. Menyediakan VAR dan SAR untuk masyarakat;</p> <p>d. Menerapkan Tata Laksana Kasus Gigitan HPR;</p> <p>e. Melaporkan kejadian kasus gigitan HPR secara cepat;</p> <p>f. Melakukan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat; dan</p> <p>g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko.</p> | | | |

| | | | |
|-----------|---|-------------|--|
| 49. | Apris Lemo Isu, SKM, M.Kes/ Pengawas Imunisasi pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat; b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies melalui pengawasan, sosialisasi dan KIE kepada seluruh lapiran masyarakat di berbagai tempat/lokasi di Wilayah NTT; dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 50. | Maria Antonia Loti Kelen, SKM/ Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 51. | Drh. Jefrianus Tahoni Amfotis / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 52. | Richard P. L. Pelt, SE/Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 53. | Fidelia G. Moruk, ST., M.M/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 54. | Yesmon R. Noach, S.Sos / Penyusun Rencana Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 55. | Jems Pallo, SE/Analis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 56. | Nurhayati Burhan, SP/ Penyusun Rencana Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| D. | SEKRETARIAT | | |
| 57. | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan Kesekretariatan; b. melaksanakan kegiatan pengeloaan data dan informasi; c. menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan; d. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 58. | Heyn Peter Ahab, S.STP., MA/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 59. | Yemin Pongtuluran, SP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 60. | Ketut Sadnyana Yasa, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 61. | Ronald D. A. Diaz Viera, S.STP/ Analis Bencana Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 62. | Yanti Y. Kana Talo, S.Sos/ Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 63. | Veronica A. Johannis, SH/ Analis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 64. | Yusta Roli Ramat, S.Sos., M.M / Penyuluhan Bencana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan Kesekretariatan; b. melaksanakan kegiatan pengeloaan data dan informasi; c. menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan; d. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 65. | Hansen Robinson Molana, S.Sos/Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 66. | Jecson Alexander Saly, ST / Analis Bangunan dan Permukiman pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 67. | Maria Magdalena Lodo, S.Kom/ Pranata Komputer pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 68. | Celia Nogo Koban, S.Kom/ Pranata Komputer pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 69. | Tinike A. Dima, S.Sos / Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 70. | Hajrat Kumpu, A.Ma/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 71. | Juliana R. da Costa, S.Sos / Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 72. | Paulus Pempi Dei/Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 73. | Oce Nenotek / Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>b</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>p</i> |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM | <i>k</i> |